

Konsep dan Teori Pembangunan

Dr. M. Tahir Kasnawi, M.Si.
Drs. Ramli AT, M.Si.



PENDAHULUAN

Dewasa ini, istilah pembangunan telah berkembang dan diartikan secara berbeda-beda, sesuai perkembangan pemahaman mengenai pembangunan dan perubahan sosial. Hal ini menyebabkan perlunya dipahami pengertian pembangunan yang akan dijelaskan pada Kegiatan Belajar 1 dalam modul ini. Perkembangan seperti itu telah melahirkan berbagai pendekatan dan teori pembangunan. Karena itu, pada Kegiatan Belajar 2 dan 3 dalam modul ini akan dijelaskan berbagai pendekatan dan teori pembangunan. Pemahaman tentang pendekatan dan teori-teori pembangunan sangat penting, karena masing-masing kelompok teori atau pendekatan saling mengisi atas berbagai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Konsekuensi lain dari perbedaan tersebut adalah adanya perbedaan dalam mengukur atau menilai tingkat keberhasilan pembangunan. Oleh karenanya, dalam modul ini juga akan dikemukakan berbagai indikator pembangunan. Pemahaman tentang berbagai pendekatan, teori, dan indikator pembangunan ini tentu akan menyebabkan pemahaman kita tentang pembangunan lebih utuh.

Materi dalam modul ini merupakan dasar dalam memahami berbagai dimensi pembangunan masyarakat, khususnya pembangunan masyarakat di desa dan perkotaan. Untuk itu, sebelum mempelajari materi-materi modul selanjutnya Anda harus benar-benar menguasai materi dalam modul ini. Dengan demikian, penguasaan materi dalam modul ini juga akan sangat membantu dalam memahami materi-materi modul selanjutnya.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dan teori pembangunan. Secara khusus, Anda diharapkan mampu menjelaskan:

1. pengertian pembangunan;
2. beberapa teori pembangunan;
3. pendekatan dan indikator pembangunan.

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian Pembangunan

A. DEFINISI PEMBANGUNAN

Pembangunan merupakan salah satu istilah yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bila itu terkait usaha memajukan kehidupan masyarakat. Pada awalnya, konsep itu lebih banyak dikaitkan dengan kemajuan material atau ekonomi. Namun, saat ini, konsep pembangunan telah mengalami pergeseran makna ke arah yang lebih bermultidimensi. Dengan demikian, masalah pembangunan juga harus didekati dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu.

Salah satu konsep pembangunan yang sangat populer di Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam GBHN 1993, yang mengemukakan bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Konsep pembangunan ini mengandung arti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau fisik seperti kecukupan pangan, sandang, perumahan, dan kesehatan, tetapi juga aspek batiniah atau non fisik, seperti pendidikan, rasa aman, kebebasan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab, dan rasa keadilan. Dengan demikian, konsep pembangunan sesuai GBHN adalah rangkaian upaya perubahan dalam semua aspek kehidupan bangsa seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Jika ditelusuri berbagai literatur yang berkaitan dengan pembangunan, kita akan menemukan berbagai pengertian pembangunan yang diungkapkan oleh berbagai ahli. Meskipun demikian, berbagai pengertian pembangunan tersebut sering kali masih terdapat titik temu atau kesepahaman dalam aspek tertentu dalam memberikan pengertian pembangunan. Misalnya pendapat Phillips Roupp yang dikutip Khairuddin (1992), mengemukakan bahwa *development signifies change from something thought to be less desirable to something thought to be more desirable* (pembangunan adalah perubahan dari sesuatu yang kurang berarti kepada yang lebih berarti).

Adapun pendapat Mizra (Khairuddin, 1992) mengemukakan bahwa *Development is basically a human enterprise and therefore it requires the combined efforts of all systems of knowledge, be they physical, biological,*

social or human to comprehend and articulate it (Pembangunan pada dasarnya adalah usaha manusia dan untuk memahami pembangunan tersebut dibutuhkan usaha-usaha yang terpadu dari seluruh sistem pengetahuan, baik fisik, biologi, sosial maupun tentang manusia).

Selanjutnya S.P. Siagian (1985), memberikan definisi pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Definisi ini mengandung beberapa ide pokok yang sangat penting diperhatikan apabila seseorang berbicara tentang pembangunan.

Pertama, bahwa pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan; meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi menjadi sejumlah tahap tertentu yang berdiri sendiri (*independent phase of a process*). Pentahapan itu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

Kedua, bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidental di masyarakat, tidaklah dapat digolongkan ke dalam kategori pembangunan.

Ketiga, bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.

Keempat, bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas di sini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Memang salah satu ciri dari masyarakat yang telah mencapai tingkat modernitas yang tinggi ialah bahwa masyarakat itu semakin dapat melepaskan diri dari tekanan dan kekangan alam dan bahkan menguasai alam sekelilingnya.

Kelima, bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan administrasi.

Keenam, bahwa kesemua hal yang telah disebutkan di muka ditujukan kepada usaha membina bangsa (*nation-building*) yang terus menerus harus

dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Bintoro dan Mustopadijaya (1983), mengemukakan bahwa pembangunan harus dilihat secara dinamis dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri (*self sustaining proces*) tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Pembangunan tergantung dari suatu *innerwill*, proses emansipasi diri. Dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan hanya menjadi mungkin karena proses pendewasaan.

Saul M. Katz (Riyadi, 1981) memberikan pandangan terhadap pokok-pokok pengertian pembangunan, yang menekankan akan pentingnya ada perubahan-perubahan dalam masyarakat. Namun demikian, dia juga mengemukakan bahwa secara dasar hendaknya untuk tercapainya perubahan-perubahan itu perlu diteladani oleh unsur-unsur pemerintah. Karena proses perubahan itu bersifat dinamis maka perlu didukung oleh kekuatan pembaharuan yang timbul dan bergerak dalam masyarakat bangsa sendiri. Dalam kekuatan pembangunan itu harus juga termasuk potensi masyarakat melalui peran sertanya, yang mampu dibangkitkan secara wajar hingga membudaya oleh unsur-unsur pemerintah.

Sementara Todaro (1983) membuat definisi pembangunan sebagai “proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap- sikap rakyat, dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*), dan pemberantasan kemiskinan absolut”. Selanjutnya dikatakan bahwa pembangunan itu pada hakikatnya haruslah menyuarakan seluruh nada dasar (*gamet*) perubahan yang dengan itu pula seluruh sistem sosial seirama atau senada dengan berbagai dasar kebutuhan dan keinginan masing-masing individual dan kelompok masyarakat yang bernaung di dalam sistem itu, bergerak maju dari kondisi kehidupan yang serba kekurangan dan tidak memuaskan, menuju kepada kondisi kehidupan yang jauh lebih baik, baik material maupun spiritual.

B. ARTI HAKIKI PEMBANGUNAN

Berdasarkan berbagai definisi dan pengertian pembangunan yang telah dikemukakan sebelumnya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah sebenarnya arti hakiki dari pembangunan itu. Pertanyaan ini muncul karena adanya berbagai perbedaan istilah-istilah yang sering digunakan dalam mengartikan pembangunan, seperti perubahan (*change*), pertumbuhan (*growth*), kemajuan (*progress*), modernisasi (*modernization*), dan pembangunan/pengembangan (*development*). Perubahan dapat terjadi tanpa unsur pembangunan atau pengembangan, demikian pula pertumbuhan dapat terjadi tanpa unsur pembangunan atau pengembangan. Bila demikian, samakah perubahan dan pertumbuhan dengan pembangunan? Pembangunan yang lazim kita pahami merupakan rujukan dari semua yang baik, positif, dan menyenangkan. Pembangunan memberikan semua yang positif dan tidak yang minus.

Menurut Denis Goulet (Todaro, 1983), paling tidak ada tiga komponen dasar atau nilai-nilai yang seharusnya terdapat dalam konsep dan petunjuk praktis untuk memahami arti hakiki dari pembangunan, yaitu menunjang kelangsungan hidup, harga diri, dan kemerdekaan dari penjajahan dan perbudakan.

“Menunjang kelangsungan hidup” artinya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic needs*). Semua orang mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar tertentu untuk memungkinkan kehidupan. Kebutuhan-kebutuhan penunjang kelangsungan hidup ini meliputi pangan, papan, kesehatan dan rasa aman. “Harga diri” berarti kemampuan untuk menjadi seorang manusia, suatu pribadi. Harga diri merupakan komponen universal dari suatu kehidupan yang baik, yang menyangkut perasaan layak dan menghormati diri sendiri, dan tidak menjadi alat orang lain demi tujuan orang lain itu semata-mata. Sementara “kemerdekaan dari penjajahan dan perbudakan” terkait dengan kemampuan untuk memilih. Nilai universal ketiga yang harus merupakan bagian dari makna pembangunan ialah konsep “kebebasan”. Kebebasan di sini hendaknya tidak dipahami dalam makna politik atau ideologi saja, melainkan dalam pengertian yang lebih mendasar mengenai kebebasan atau emansipasi dari perampasan kondisi materiil kehidupan, dari penjajahan sosial atas manusia, terhadap alam, kebodohan orang-orang lain, penderitaan, lembaga-lembaga, dan keyakinan-keyakinan yang bersifat dogmatik.

Kehidupan yang lebih baik adalah sesuatu yang ingin dicapai melalui pembangunan. Terkait dengan itu, selanjutnya Todaro mengemukakan bahwa apa pun komponen dari kehidupan yang lebih baik, pembangunan pada semua masyarakat paling tidak harus mempunyai 3 sasaran:

1. meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan sebagainya;
2. meningkatkan taraf hidup, yaitu selain meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, pendidikan yang lebih tinggi, termasuk perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan, yang keseluruhannya bukan hanya akan memperbaiki kesejahteraan material, tetapi juga menghasilkan rasa percaya diri sebagai individu dan bangsa;
3. memperluas pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi setiap orang dan bangsa dengan membebaskan mereka dari perbudakan dan ketergantungan, bukan hanya dalam hubungannya dengan orang dan negara lain, tetapi juga terhadap kebodohan dan kesengsaraan manusia.

Sejalan dengan pengertian pembangunan sebelumnya, Bryant dan White (1987) mengusulkan agar pembangunan diartikan sebagai peningkatan kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya. Pengertian ini memberi pemahaman bahwa proyek dan program pembangunan bukan saja perlu membuahkan perubahan yang sifatnya fisik dan konkret, melainkan juga perlu menghasilkan hal-hal semacam itu dengan cara tertentu sehingga rakyat memperoleh kemampuan yang lebih besar untuk memilih dan memberikan tanggapan terhadap perubahan tersebut. Ini berarti bahwa perubahan yang terencana harus memperhatikan potensi individu-individu di samping memperhatikan otonomi mereka sebagai pribadi-pribadi.

Arti pembangunan seperti ini berbeda dengan modernisasi maupun pertumbuhan. Modernisasi sering diartikan dalam kaitan dengan spesialisasi yang berkembang dan juga perkembangan aneka struktur serta institusi, tetapi dalam bahasa yang gampang ia berarti dipakainya simbol, gaya, dan teknologi Dunia Pertama. Namun demikian, suatu negara dapat saja menjadi modern dalam gaya maupun teknologi tetapi tetap tidak mampu mempengaruhi masa depannya atau mengembangkan potensinya. Dan, kendati pertumbuhan mungkin dapat memperbaiki keadaan, pertumbuhan saja tidaklah mencukupi. Contoh, bayi yang bertambah bobot badannya

hampir tidak dianggap “berkembang” oleh orang tua, dokter, maupun guru. Demikian pula pemimpin-pemimpin di negara-negara sedang berkembang tidak menganggap peningkatan Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product (GNP)* sebagai satu-satunya indikator pembangunan.

Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan seperti yang dikemukakan oleh Bryant dan White (Efendi, dkk., 1989), mengandung empat aspek. *Pertama*, pembangunan harus memberikan penekanan pada kapasitas (*capacity*), kepada apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tersebut serta energi yang diperlukan untuk itu. *Kedua*, pembangunan harus menekankan pemerataan (*equity*), perhatian yang tidak merata pada berbagai kelompok masyarakat akan memecah-belah masyarakat dan akan menghancurkan kapasitas mereka. *Ketiga*, pembangunan mengandung arti pemberian kuasa dan wewenang (*empowerment*) yang lebih besar kepada rakyat. Hasil pembangunan baru cukup bermanfaat bagi masyarakat bila mereka memiliki wewenang yang sepadan. Pembangunan harus mengandung upaya peningkatan wewenang kepada kelompok masyarakat yang lemah. Koreksi terhadap keputusan-keputusan yang tidak adil yang cukup besar. *Keempat*, pembangunan mengandung pengertian kelangsungan perkembangan (*sustainable*) dan interdependensi di antara negara-negara di dunia. Karena konsep kelangsungan dan kelestarian pembangunan ini, kendala sumber daya yang terbatas dan langka akan menjadi pertimbangan utama dalam upaya meningkatkan kapasitas tadi.

Effendi, dkk., selanjutnya mengemukakan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan peningkatan kemampuan atau pembangunan kualitas manusia, seperti peningkatan kapasitas produksi, pemerataan, pemberian wewenang dan kekuasaan, kemampuan untuk membangun secara keberlangsungan (*sustainable*), dan kesadaran akan ketergantungan (*interdependency*), salah satu caranya adalah diperlukan desentralisasi yang cukup dalam proses pembuatan keputusan. Desentralisasi ini tidak sekadar mencakup delegasi sebagian otoritas formal dalam bentuk dekonsentrasi (atau pelimpahan sebagian wewenang implementasi kepada daerah) dan devolusi (pelimpahan sebagian wewenang pembuatan kebijaksanaan dan pengendalian atas sumber daya kepada daerah), tetapi mencakup penyerahan otonomi yang lebih luas kepada daerah. Sebagai contoh, yang memiliki kapasitas untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan adalah masyarakat itu sendiri. Karena itu, kewenangan pembuatan keputusan yang lebih besar harus diberikan kepada

rakyat dengan meningkatkan fungsi DPRD, LKMD, dan sebagainya. Pemerintah Daerah harus diberikan kewenangan yang lebih besar untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan daerah, termasuk kewenangan menggali sumber daya untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Tercakup dalam desentralisasi kewenangan ini adalah pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berkiprah dalam usaha pembangunan melalui jalur-jalur swasta, LSM, maupun koperasi.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan pengertian/definisi pembangunan!
- 2) Jelaskan beberapa ide pokok yang terkandung dalam pengertian pembangunan!
- 3) Jelaskan perbedaan arti pembangunan dengan beberapa istilah yang sering digunakan dalam menjelaskan arti pembangunan!
- 4) Jelaskan arti pembangunan dilihat dari aspek nilai-nilai kemanusiaan!
- 5) Jelaskan beberapa implikasi arti pembangunan yang menekankan pada peningkatan kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pelajari kembali definisi pembangunan!
- 2) Pelajari kembali pengertian pembangunan yang dikemukakan oleh S.P. Siagian!
- 3) Pelajari kembali uraian bagian arti hakiki pembangunan, khususnya perbedaannya dengan konsep lain yang terkait, yaitu perubahan (*change*), pertumbuhan (*growth*), kemajuan (*progress*), dan modernisasi (*modernization*),.
- 4) Pelajari kembali pendapat Denis Goulet tentang komponen dasar atau nilai-nilai pembangunan.
- 5) Pelajari kembali arti pembangunan yang dikemukakan oleh Bryant dan White.



RANGKUMAN

Dari sejarah perubahan dalam mengonseptualisasikan pembangunan, terdapat berbagai variasi cara mendefinisikan pembangunan. Mula-mula pembangunan hanya diartikan secara ekonomi, kemudian berkembang bahwa pembangunan juga dilihat sebagai suatu konsep yang dinamis dan bersifat multidimensional atau mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, politik, sosial budaya, dan sebagainya.

Berbagai istilah yang sering digunakan dalam menjelaskan pengertian pembangunan, seperti perubahan, pertumbuhan, kemajuan, dan modernisasi. Akan tetapi istilah-istilah tersebut tidak sama arti dan maknanya dengan pembangunan, karena pembangunan merupakan rujukan semua yang baik, positif, dan menyenangkan. Sementara perubahan, pertumbuhan, kemajuan, maupun modernisasi dapat saja terjadi tanpa unsur pembangunan.

Dilihat dari arti hakiki pembangunan, pada dasarnya menekankan pada aspek nilai-nilai kemanusiaan, seperti menunjang kelangsungan hidup atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup (*basic needs*), harga diri atau adanya perasaan yang layak menghormati diri sendiri dan tidak menjadi alat orang lain saja, dan kebebasan atau kemerdekaan dari penjajahan dan perbudakan yang terkait dengan kemampuan untuk memilih. Selain itu, arti pembangunan yang dalam juga menyangkut kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya, yang mencakup kapasitas, keadilan, penumbuhan kuasa dan wewenang, dan saling ketergantungan.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pada mulanya konsep pembangunan hanya diartikan dalam arti
 - A. politik
 - B. ekonomi
 - C. sosial
 - D. budaya

- 2) Berikut ini, beberapa ide pokok yang perlu diperhatikan apabila seseorang berbicara tentang pembangunan, *kecuali* pembangunan
 - A. merupakan suatu proses
 - B. dilakukan secara sadar
 - C. merupakan suatu sistem
 - D. mengarah pada modernitas

- 3) Kegiatan yang dapat digolongkan dalam kategori pembangunan adalah, kegiatan yang dilakukan secara
 - A. sadar
 - B. pasti
 - C. insidental
 - D. berulang

- 4) Pembangunan pada dasarnya menekankan akan pentingnya
 - A. pertumbuhan ekonomi
 - B. perubahan dalam masyarakat
 - C. kemajuan politik
 - D. modernisasi

- 5) Dalam konsep untuk memahami arti hakiki dari pembangunan maka kebutuhan dasar seperti pangan, papan, kesehatan dan rasa aman adalah termasuk dalam komponen dasar atau nilai-nilai yang tergolong....
 - A. kelangsungan hidup
 - B. harga diri
 - C. kebebasan
 - D. pertumbuhan

- 6) Nilai pembangunan yang menekankan pada perasaan layak dan menghormati diri sendiri, adalah termasuk dalam arti hakiki pembangunan dalam komponen
 - A. kelangsungan hidup
 - B. harga diri
 - C. kebebasan
 - D. pertumbuhan

- 7) Nilai pembangunan yang menekankan pada kemerdekaan dari penjajahan dan perbudakan, adalah termasuk dalam arti hakiki pembangunan dalam komponen....
 - A. kelangsungan hidup
 - B. harga diri

- C. kebebasan
D. pertumbuhan
- 8) Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mengandung empat aspek, tiga di antaranya, *kecuali*
A. penekanan pada kapasitas
B. penekanan pada pemerataan
C. pemberian kuasa dan wewenang
D. kelangsungan penegakan hukum
- 9) Pembangunan yang menekankan pada hasil/manfaat pembangunan harus dinikmati oleh semua penduduk, adalah termasuk dalam implikasi pengertian pembangunan
A. kapasitas
B. keadilan
C. penumbuhan kuasa dan wewenang
D. kelangsungan yang tertunjang
- 10) Pembangunan yang menekankan pada saling ketergantungan, termasuk dalam implikasi pengertian pembangunan
A. kapasitas
B. keadilan
C. penumbuhan kuasa dan wewenang
D. kelangsungan yang tertunjang

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Beberapa Teori Pembangunan

Selama seperdua abad terakhir, teori pembangunan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terkait dengan perhatian para ahli terhadap masalah pembangunan, khususnya terhadap pembangunan di negara-negara berkembang yang sangat besar. Jumlah teori yang membahas pembangunan yang sangat banyak dan beragam dengan perspektif yang berbeda-beda pula maka untuk membantu memudahkan memahaminya maka teori-teori ini bisa dikelompokkan dalam beberapa perspektif atau paradigma.

Suwarsono dan So (1991) dalam mengurai sejumlah teori ini mengelompokkannya berdasarkan tiga perspektif, yaitu perspektif modernisasi, dependensi, dan sistem dunia. Sementara dengan cara yang hampir sama, Budiman (1995) mengklasifikasikan teori pembangunan juga dalam tiga kelompok, yaitu teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori pasca ketergantungan.

Pembahasan dalam bagian ini terutama mengacu pada pengelompokan yang dibuat Budiman. Pemahaman terhadap ketiga kelompok teori ini, meskipun yang dibahas hanya teori-teori penting saja, diharapkan dapat membantu Anda dalam mengetahui persoalan pembangunan dan jawaban untuk memecahkannya. Bahkan mungkin Anda dapat ikut berpikir dan merumuskan jawaban baru yang lebih baik. Tetapi minimal, uraian ini dapat membantu dalam membuat skema atau peta teori pembangunan yang pernah ada.

Kelompok teori modernisasi terutama menekankan pada faktor manusia dan nilai-nilai budaya sebagai pokok persoalan dalam pembangunan. Berbeda dengan kelompok teori modernisasi, kelompok teori ketergantungan merupakan reaksi terhadap teori modernisasi yang dianggap tidak mencukupi, bahkan dianggapnya menyesatkan. *Ketiga*, kelompok yang disebut sebagai teori pasca ketergantungan. Kelompok teori ini merupakan reaksi atau menolak teori ketergantungan yang dianggap terlalu menyederhanakan persoalan, padahal dalam kenyataannya gejala pembangunan khususnya di negara-negara sedang berkembang jauh lebih kompleks.

A. KELOMPOK TEORI MODERNISASI

Perangkat teori modernisasi berasal dari konsep teori evolusi yang menganggap perubahan sosial pada dasarnya merupakan gerakan searah, linear, progresif dan perlahan-lahan, yang mengubah masyarakat dari tahapan primitif ke tahapan yang lebih maju, dan membuat berbagai masyarakat memiliki bentuk dan struktur serupa (Suwarsono dan So, 1991). Berdasarkan premis seperti ini, mengutip Huntington, Suwarsono dan So mengemukakan bahwa teoritis perspektif modernisasi membangun kerangka teori dan tesisnya dengan ciri-ciri pokok:

1. Modernisasi merupakan proses bertahap. Hal itu misalnya terlihat antara lain dalam teori Rostow.
2. Modernisasi merupakan proses homogenisasi. Jadi, dengan modernisasi akan terbentuk berbagai masyarakat dengan tendensi dan struktur serupa.
3. Modernisasi terkadang mewujud dalam bentuk lahirnya sebagai proses *Eropanisasi* dan *Amerikanisasi*, atau dengan kata lain modernisasi sama dengan Barat.
4. Modernisasi dilihat sebagai proses yang tidak bergerak mundur.
5. Modernisasi merupakan perubahan progresif. Dengan demikian, modernisasi tidak saja merupakan sesuatu yang pasti terjadi, tetapi juga diperlukan dan diinginkan.
6. Modernisasi memerlukan waktu panjang (evolusioner).

Selain teori evolusi, perangkat asumsi lain teori modernisasi adalah teori fungsional. Suwarsono dan So menjelaskan bahwa teori fungsional memberikan tekanan pada keterkaitan dan ketergantungan lembaga sosial, pentingnya variabel kebakuan dan pengukur dalam sistem budaya, dan adanya kepastian keseimbangan dinamis-stasioner dari perubahan sosial. Terpengaruh oleh teori ini, ajaran modernisasi secara implisit mengandung sejumlah asumsi berikut.

1. Modernisasi merupakan proses sistematis, yang melibatkan perubahan pada hampir segala aspek tingkah laku sosial, termasuk di dalamnya industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi, dan sebagainya.
2. Modernisasi diartikan sebagai proses *transformasi*, di mana struktur dan nilai-nilai tradisional secara total harus diganti dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai modern.
3. Melibatkan proses yang terus-menerus (*immanent*).

Berbagai teori yang termasuk dalam kelompok Teori Modernisasi, seperti Teori Max Weber tentang Etika Protestan, Teori David McClelland tentang Dorongan Berprestasi, dan sebagainya, namun pada uraian berikut ini hanya dijelaskan tiga teori modernisasi, yaitu Teori Neil Smelser tentang Diferensiasi Struktural, Teori Harrod-Domar tentang tabungan serta investasi, dan Teori Rostow tentang tahap-tahap pembangunan.

1. Teori Neil Smelser tentang Diferensiasi Struktural

Modernisasi menurut Wilbert Moore ialah suatu transformasi secara menyeluruh masyarakat tradisional atau masyarakat pramodern yang corak teknologi serta organisasi sosialnya berkaitan seperti apa yang terdapat di negara-negara Dunia Barat yang maju - makmur dari segi ekonomi dan secara relatif stabil dari segi politik (Long, 1987).

Salah satu teori yang dapat menggambarkan proses modernisasi tersebut adalah teori Neil Smelser tentang “diferensiasi struktural”. Menurut Smelser perkembangan ekonomi dan masyarakat itu mempunyai (sebagai ciri utama) struktur yang sangat berbeda, manakala perekonomian dan masyarakat terbelakang pun secara relatif tidak berbeda jauh. Perubahan bagi Smelser, berkisar di sekitar proses itu. Dengan diferensiasi, Smelser mengartikan bahwa proses sama halnya sebagaimana unit-unit sosial yang khusus dan berotonomi itu dibentuk. Pembentukan unit-unit sosial seperti ini tampaknya sama dengan yang berlaku di dalam beberapa bidang yang berbeda; dalam bidang ekonomi, keluarga, sistem politik dan institusi-institusi politik.

Model Smelser ini tidak terlibat dalam usaha untuk mengisolasi faktor penentu ekonomi, tetapi sebaliknya merupakan suatu usaha untuk memberikan transformasi sosial yang mengikuti pembangunan ekonomi, dan ditegaskannya sebagaimana halnya dengan Lewis, sebagai pertumbuhan *output* setiap individu dari kelompok masyarakat. Pembangunan ekonomi berlangsung melalui:

- a. modernisasi teknologi, membawa perubahan dari teknik-teknik tradisional kepada aplikasi ilmu pengetahuan;
- b. pertanian komersial yang bercirikan pergeseran dari pertanian subsistem menuju pertanian untuk ekspor, mengadakan spesialisasi terhadap produksi yang akan diperdagangkan, dan menggiatkan buruh upahan;
- c. proses industrialisasi yang menggambarkan transisi dari penggunaan kekuatan hewan dan manusia menuju penggunaan tenaga mesin, dan akhirnya;

- d. urbanisasi yang meliputi perubahan-perubahan dimensi ekologi dan pergerakan pertanian dan perkampungan ke arah pertumbuhan pusat-pusat kota.

Proses-proses tersebut menurut Smelser, berlaku secara serentak dan kadang-kadang dalam kecepatan yang berbeda. Misalnya, dalam beberapa situasi kolonial, pertanian menjadi komersial tanpa disertai oleh industrialisasi, atau industrialisasi berkembang hanya dengan urbanisasi yang sedikit saja. Smelser mengakui bahwa perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam keadaan pramodern dan struktur-struktur tradisional mungkin mempengaruhi kekuatan modernisasi atas suatu sistem sosial tertentu (dengan itu variasi ke arah perubahan), ia menegaskan bahwa contoh model akan menggambarkan sifat-sifat umum, ciri-ideal-tipikal dan proses pembangunan sosial itu sendiri.

2. Teori Harrod-Domar tentang Tabungan dan Investasi

Budiman (1995) mengemukakan bahwa salah satu teori ekonomi pembangunan yang sampai sekarang masih terus dipakai, meskipun sudah dikembangkan secara lebih canggih, adalah teori dari Evsey Domar dan Roy Harrod. Kedua ahli ekonomi ini, yang bekerja secara terpisah, mencapai kesimpulan yang sama, yakni bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga akan rendah.

Asumsi model Harrod-Domar bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah penambahan investasi modal. Masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Kalau ada modal, modal itu diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi. Berdasarkan pada model ini, resep para ahli ekonomi pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga untuk memecahkan persoalan keterbelakangannya adalah dengan mencari tambahan modal, baik dari dalam negeri (dengan mengusahakan peningkatan tabungan dalam negeri), maupun dari luar negeri (melalui penanaman modal dan pinjaman luar negeri).

Model pertumbuhan Harrod-Domar yang disederhanakan oleh Michel P. Todaro dengan rumus akhir adalah sebagai berikut.

$$\frac{Y}{Y} = \frac{s}{k}$$

Keterangan:

Y/Y = pertumbuhan PNK (Produk Nasional Kotor)

s = tabungan nasional

k = rasio output-modal

Sebagai contoh, jika kita menganggap bahwa rasio *output*-modal nasional dalam beberapa negara yang kurang maju, katakanlah 3,0 dan rasio tabungan bersama adalah 6% dari PNK maka negara ini bisa mencapai pertumbuhan 2% per tahun, karena:

$$\frac{Y}{Y} = \frac{s}{k} = \frac{6\%}{3} = 2\%$$

Jika tingkat tabungan nasional agaknya bisa diperbesar dari 6%, katakanlah sampai 15% - umpamanya melalui peningkatan pajak, bantuan luar negeri dan/atau dengan cara mengorbankan konsumsi umum maka pertumbuhan PNK bisa ditingkatkan dari 2% menjadi 5%, karena:

$$\frac{Y}{Y} = \frac{s}{k} = \frac{15\%}{3} = 5\%$$

Modifikasi-modifikasi dari Harrod-Domar memang terus terjadi. Tetapi prinsipnya sama, yaitu kekurangan modal, tabungan dan investasi menjadi masalah utama pembangunan. Salah satu teori yang merupakan modifikasi dari teori ini, misalnya, tercermin pada teori Rostow tentang tingkat-tingkat pertumbuhan dan tinggal landas yang akan diuraikan selanjutnya.

3. Teori W.W. Rostow tentang Lima Tahap Pembangunan

Dalam bukunya yang terkenal, *The Stages of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto* yang mula-mula terbit pada tahun 1960, Rostow (seorang ahli ekonomi) menguraikan teorinya tentang proses pembangunan dalam sebuah masyarakat. Seperti juga para ahli ekonomi umumnya pada zaman itu, bagi Rostow pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. Proses ini, dengan berbagai variasinya, pada dasarnya berlangsung sama di mana pun dan kapan pun juga. Variasi yang ada bukanlah merupakan perubahan yang mendasar dari proses ini, melainkan hanya berlangsung di permukaan saja. Rostow membagi proses

pembangunan menjadi lima tahap, seperti dijelaskan oleh Budiman (1995) sebagai berikut.

a. Masyarakat tradisional

Ilmu pengetahuan pada masyarakat ini masih belum banyak dikuasai. Karena itu, masyarakat semacam ini masih dikuasai oleh kepercayaan-kepercayaan tentang kekuatan di luar kekuasaan manusia. Manusia dengan demikian tunduk kepada alam, belum bisa menguasai alam. Akibatnya, produksi masih sangat terbatas. Masyarakat ini cenderung bersifat statis, dalam arti kemajuan berjalan dengan sangat lambat. Produksi dipakai untuk konsumsi. Tidak ada investasi. Pola dan tingkat kehidupan generasi kedua pada umumnya hampir sama dengan kehidupan generasi sebelumnya (mengalami sedikit perubahan).

b. Prakondisi untuk lepas landas

Masyarakat tradisional, meskipun sangat lambat, terus bergerak. Pada suatu titik, dia mencapai posisi prakondisi untuk lepas landas. Biasanya, keadaan ini terjadi karena ada campur tangan dari luar, dari masyarakat yang sudah lebih maju. Perubahan ini tidak datang karena faktor-faktor internal masyarakat tersebut, karena pada dasarnya masyarakat tradisional tidak mampu untuk mengubah dirinya sendiri. Campur tangan dari luar ini mengguncangkan masyarakat tradisional itu. Di dalamnya mulai berkembang ide pembaruan. Ide-ide yang berkembang ini bukan sekedar pendapat yang menyatakan bahwa kemajuan ekonomi dapat dicapai, tetapi bahwa kemajuan ekonomi merupakan suatu kondisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang dianggap baik; kebesaran bangsa, keuntungan pribadi, kemakmuran umum, atau kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka nantinya. Misalnya, seperti yang terjadi di Jepang dengan dibukanya masyarakat ini oleh armada angkatan laut Amerika Serikat.

Pada periode ini, usaha untuk meningkatkan tabungan masyarakat terjadi. Tabungan ini kemudian dipakai untuk melakukan investasi pada sektor-sektor produktif yang menguntungkan, termasuk misalnya pendidikan. Investasi ini dilakukan baik oleh perorangan maupun oleh negara. Sebuah negara nasional yang sentralistis juga terbentuk. Pendeknya, segala usaha untuk meningkatkan produksi mulai bergerak dalam periode ini.

Pada periode ini mulai tumbuh kaum usahawan, adanya perluasan pasar, pembangunan industri sehingga keadaan ini merupakan prakondisi untuk

tahap berikutnya. Bahkan secara umum orang sependapat bahwa elit baru harus muncul dan harus diberi lapangan untuk memulai pembentukan suatu industri modern, karena golongan elit baru inilah yang menjadi inti dari terciptanya prasyarat-prasyarat bagi *take-off*.

c. *Lepas landas*

Periode ini ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan merupakan sesuatu yang berjalan wajar, tanpa adanya hambatan yang berarti seperti ketika pada periode prakondisi untuk lepas landas.

Pada periode ini, tabungan dan investasi yang efektif meningkat dari 5% menjadi 10% dari pendapatan nasional, atau lebih. Juga, industri-industri baru mulai berkembang dengan sangat pesat. Keuntungannya sebagian besar ditanamkan kembali ke pabrik yang baru. Sektor modern dari perekonomian dengan demikian jadi berkembang.

Dalam pertanian, teknik-teknik baru juga tumbuh. Pertanian menjadi usaha komersial untuk mencari keuntungan, dan bukan sekadar untuk konsumsi. Peningkatan dalam produktivitas pertanian merupakan sesuatu yang dalam proses lepas landas, karena proses modernisasi masyarakat membutuhkan hasil pertanian yang banyak, supaya ongkos perubahan ini tidak terlalu mahal.

Tahap lepas landas (*take-off*) merupakan tahap yang kritis, karena itu negara harus mampu secara otonom membangun struktur ekonomi nasional yang kuat. Rostow mengemukakan 3 cara yang dapat ditempuh, yaitu: (a) menggali/menambah investasi melalui kebijaksanaan pajak, (b) dana investasi dapat juga diperoleh melalui lembaga-lembaga keuangan, bank, pasar modal, obligasi pemerintah, dan sebagainya, dan (c) melalui perdagangan internasional.

Menurut Rostow titik terpenting dalam gerak kemajuan dari masyarakat yang satu ke yang lainnya adalah pada priode lepas landas. Oleh karena itu lepas landas harus memenuhi semua dari ketiga kondisi yang saling berkaitan berikut ini.

- 1) Meningkatnya investasi di sektor produktif dari misalnya 5% menjadi 10% atau lebih dari pendapatan nasional.
- 2) Tumbuhnya satu atau lebih sektor industri manufaktur yang penting, dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi.

- 3) Adanya atau munculnya secara cepat lembaga-lembaga politik dan sosial yang bisa memanfaatkan berbagai dorongan gerak ekspansi dari sektor ekonomi modern dan akibat yang mungkin terjadi dengan adanya kekuatan-kekuatan ekonomi dari luar sebagai hasil dari lepas landas; di samping itu lembaga-lembaga ini kemudian bisa membuat pertumbuhan menjadi sebuah proses yang berkesinambungan.

d. Bergerak ke kedewasaan

Setelah lepas landas, akan terjadi proses kemajuan yang terus bergerak ke depan, meskipun kadang-kadang terjadi pasang surut. Antara 10% sampai 20% dari pendapatan nasional selalu diinvestasikan kembali, supaya bisa mengatasi persoalan pertumbuhan penduduk.

Industri berkembang dengan pesat. Negara ini memantapkan posisinya dalam perekonomian global: barang-barang yang tadinya diimpor sekarang diproduksi di dalam negeri; impor baru menjadi kebutuhan, sementara ekspor barang-barang baru mengimbangi impor.

Sesudah 60 tahun sejak sebuah negara lepas landas (atau 40 tahun setelah periode lepas landas berakhir), tingkat kedewasaan biasanya tercapai. Perkembangan industri terjadi tidak saja meliputi teknik-teknik produksi, tetapi juga dalam aneka barang yang diproduksi. Yang diproduksi bukan saja terbatas pada barang konsumsi, tetapi juga barang modal.

e. Zaman Konsumsi Massal yang Tinggi

Karena kenaikan pendapatan masyarakat, konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok untuk hidup, tetapi meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Produksi industri juga berubah, dari kebutuhan dasar menjadi kebutuhan barang konsumsi yang tahan lama.

Pada periode ini, investasi untuk meningkatkan produksi tidak lagi menjadi tujuan yang paling utama. Sesudah taraf kedewasaan dicapai, surplus ekonomi akibat proses politik yang terjadi dialokasikan untuk kesejahteraan sosial dan penambahan modal. Pada titik ini, pembangunan sudah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan, yang bisa menopang kemajuan secara terus-menerus.

B. KELOMPOK TEORI KETERGANTUNGAN

Pembangunan menurut teori ketergantungan digambarkan sebagai proses “keterbelakangan” atau proses pembangunan diberi label sebagai “ketergantungan” dalam pembangunan. Teori ketergantungan lebih memperhatikan sifat dari proses pertumbuhan ekonomi, dan memandang pembangunan sebagai pembebasan dari hubungan-hubungan yang menindas dan eksploitatif, baik antarmanusia maupun antarbangsa.

Inti pemikiran teori ketergantungan seperti yang dikemukakan oleh Budiman (1995) didasarkan pada teori-teori imperialisme dan kolonialisme, baik yang Marxis maupun yang bukan, serta pemikiran Paul Baran dan Raul Prebisch. Teori ketergantungan kemudian menentang pendapat kaum Marxis klasik yang beranggapan bahwa (1) negara-negara pinggiran yang para kapitalis merupakan negara-negara yang tidak dinamis, yang memakai cara produksi Asia yang berlainan dengan cara produksi feodal di Eropa yang menghasilkan kapitalisme, dan (2) negara-negara pinggiran ini, setelah disentuh oleh kapitalis maju, akan bangun dan berkembang mengikuti jejak negara-negara kapitalis maju.

Andre Gunder Frank adalah salah seorang pencetus teori ketergantungan. Dalam konteks proses hubungan ekonomi antara negara maju dengan negara miskin, Frank membuat pembagian yaitu apa yang disebutnya dengan negara-negara metropolis maju (*developed metropolitan countries*) dan negara-negara satelit yang terbelakang (*satellite underdeveloped countries*). Hubungan ekonomi antara negara metropolis maju dan negara satelit yang terbelakang ini merupakan aspek utama perkembangan sistem kapitalis dalam skala internasional.

Menurut Frank, hubungan metropolis-satelit menyentuh keseluruhan sektor di negara-negara miskin, dan keterbelakangan sektor tradisional justru diakibatkan oleh adanya kontak dengan sistem kapitalis dunia yang masuk ke negara miskin melalui sektor modern di negara ini. Sektor modern merupakan kaki tangan sistem kapitalis dunia yang melakukan eksploitasi terhadap daerah atau sektor yang sekarang menjadi terbelakang. Frank tidak setuju pendapat yang mengatakan bahwa perkembangan ekonomi negara miskin akan terjadi sebagai akibat hubungan ekonomi dengan negara maju. Hal ini didasarkan pada penemuan historis di Amerika Latin, yang memberi petunjuk bahwa perkembangan yang sehat dan otonom justru terjadi pada waktu hubungan metropolis-satelit ini tidak ada.

Dos Santos sebagai penganut teori ketergantungan yang lain memberikan definisi ketergantungan bahwa negara-negara pinggir atau satelit pada dasarnya hanya merupakan bayangan dari negara-negara pusat metropolis. Bila negara pusat yang menjadi induknya berkembang, negara satelit bisa juga ikut berkembang. Bila negara induknya mengalami krisis, satelitnya pun kejangkitan krisis.

Definisi ini sebenarnya berbeda dengan konsep ketergantungan Frank. Bagi Frank, hubungan dengan negara metropolis selalu berakibat negatif bagi negara satelit. Tidak mungkin ada perkembangan di negara satelit, selama negara ini masih berhubungan dan menginduk kepada negara metropolis.

Dos Santos beranggapan lain. Dia menyatakan bahwa negara pinggir atau satelit bisa juga berkembang, meskipun perkembangan ini merupakan perkembangan yang bergantung, perkembangan ikutan. Dinamika perkembangan ini tidak datang dari negara satelit tersebut, tetapi dari negara induknya. Dengan demikian, meskipun Frank dan Dos Santos merupakan tokoh dari teori ketergantungan, keduanya berbeda dalam beberapa hal.

Sumbangan Dos Santos yang lain adalah uraiannya yang lebih rinci tentang bentuk-bentuk ketergantungan. Dia membedakan tiga bentuk ketergantungan, yakni:

1. *Ketergantungan Kolonial*. Di sini terjadi dominasi politik, dalam bentuk penguasaan kolonial atau penjajah, dari negara pusat terhadap negara pinggir. Kegiatan ekonomi yang utama adalah perdagangan ekspor dari hasil bumi yang dibutuhkan oleh negara penjajah. Para penjajah memonopoli tanah, pertambangan dan tenaga kerja. Hubungan antara penjajah dan penduduk setempat bersifat eksploitatif.
2. *Ketergantungan finansial-industrial*. Di sini tidak ada dominasi politik dalam bentuk penjajahan. Negara pinggir secara politis merdeka. Tetapi, dalam kenyataannya, negara pinggir ini masih dikuasai oleh kekuatan-kekuatan finansial dan industrial dari negara pusat sehingga praktis ekonomi negara pinggir merupakan satelit dari negara pusat. Seperti pada ketergantungan kolonial, negara pinggir masih mengeksport bahan mentah bagi kebutuhan industri negara pusat. Negara pusat menanamkan modalnya, baik langsung atau melalui kerja sama dengan pengusaha lokal, untuk menghasilkan bahan baku ini. Dengan demikian, pengendalian dilakukan melalui kekuasaan ekonomi, dalam bentuk kekuasaan finansial-industrial.

3. *Ketergantungan teknologis-industrial*. Ini adalah bentuk ketergantungan baru. Kegiatan ekonomi di negara pinggiran tidak lagi berupa ekspor bahan mentah untuk keperluan industri di negara pusat. Perusahaan-perusahaan multinasional dari negara pusat mulai menanam modalnya dalam kegiatan industri yang produknya ditujukan ke pasar dalam negeri dari negara-negara pinggiran. Meskipun industri ini ada di negara pinggiran, bahkan sering kali dimiliki oleh pengusaha lokal, tetapi teknologinya ada di tangan perusahaan-perusahaan multinasional. Sering kali barang-barang modal berupa mesin industri yang ada tidak dijual sebagai komoditi, melainkan disewakan melalui perjanjian paten. Dengan demikian, penguasaan terhadap surplus industri dilakukan melalui monopoli teknologi-industrial.

Klasifikasi ketergantungan yang dikemukakan oleh Dos Santos tersebut, semuanya merupakan ketergantungan sebagai suatu perangkat struktur, yaitu karena adanya perbedaan struktur internal antara negara maju dengan negara terbelakang sehingga negara-negara terbelakang mengalami ketidakadilan dalam hubungan tersebut. Proses ketidakadilan ini sesungguhnya berasal dari dominasi negara-negara maju sebagai pemilik modal dalam menentukan kebijaksanaan investasinya sehingga investasi tersebut meskipun dirasakan positif oleh negara-negara sedang berkembang, tetap menimbulkan ketimpangan dalam perolehan nilai surplus yang masuk ke masing-masing negara. Nilai surplus ini biasanya lebih banyak yang mengalir ke negara investor daripada ke negara yang dibantu.

Konsep pertukaran tidak adil yang dikembangkan oleh Arghiri Emmanuel dalam Arief dan Sasono (1984), diterangkan melalui persamaan notasi sebagai berikut.

q = modal tetap	e = tingkat eksploitasi
v = modal berubah	m = komposisi organik modal
u = nilai lebih	r = tingkat keuntungan
N = nilai barang	p = harga barang

Emmanuel mengemukakan bahwa tingkat upah yang rendah di negara terbelakang untuk memproduksi barang ekspor ke negara maju dalam proses perdagangan internasional adalah penyebab utama terjadinya pengalihan surplus besar-besaran dari negara-negara terbelakang. Ilustrasi pertama ialah proses perdagangan internasional dalam bentuk primer, dan ilustrasi kedua

ialah perdagangan internasional sesudah terjadi penurunan tingkat upah di negara terbelakang. Angka-angka yang dikemukakan hanya merupakan perumpamaan saja.

Ilustrasi 1

Komoditi	q	v	u	N	e	m	r	p
A	1000	500	500	2000	1	2/3	43%	2140
B	1000	1000	1000	3000	1	2/3	43%	2860

Ilustrasi 2

Komoditi	q	v	u	N	e	m	r	P
A	1000	500	500	2000	1	2/3	66,66%	2500
B	1000	1000	1500	3000	3	2/3	66,66%	2500

Dalam ilustrasi pertama, pertukaran tidak adil yang terjadi disebabkan adanya perbedaan dalam komposisi organik modal. Dalam contoh ini, kedua komoditi berdasarkan tingkat harganya dipertukarkan dengan perbandingan 2,86 : 2,14 dan nilai masing-masing menimbulkan perbandingan 3 : 2. Jadi, di sini terselubung suatu pengalihan nilai dari negara yang memproduksi komoditi B ke negara yang memproduksi komoditi A.

Dalam ilustrasi yang kedua, tingkat upah di negara yang memproduksi komoditi B turun sebesar 50%. Di sini kita lihat, tingkat eksploitasi meningkat sedangkan komposisi organik modal menjadi sama di tiap negara. Harga barang berbanding 1 : 1, sedangkan nilai barang berbanding 3 : 2. Di sini kita lihat kembali bahwa negara yang memproduksi komoditi B rugi dalam bentuk adanya pengalihan nilai. Tetapi pada waktu ini, ketidakadilan dalam proses pertukaran bukan disebabkan oleh adanya tingkat upah yang lebih rendah di negara yang memproduksi komoditi B. Jika bersamaan dengan ini terjadi pula komposisi organik modal yang bertambah rendah di negara yang memproduksi komoditi B maka tingkat ketidakadilan yang menimpa negara ini menjadi lebih tinggi.

Dari dua teori pembangunan yang telah diuraikan, yaitu teori modernisasi dan teori ketergantungan, dapat dilihat adanya perbedaan dalam melihat masalah pembangunan di negara-negara terbelakang. Teori modernisasi memandang pembangunan sebagai proses mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mencapai tingkat produktivitas per kapita setinggi mungkin. Dalam istilah Rostow, tujuannya adalah *high*

massconsumption society. Artinya, pembangunan diukur dengan tingkat pertumbuhan penghasilan per kapita. Berbeda dengan teori modernisasi, teori ketergantungan memandang pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meliputi pemerataan hasil pembangunan itu. Teori modernisasi memandang manusia sebagai sarana pembangunan, artinya kalau pertumbuhan ekonomi mengharuskan manusia merubah nilai-nilai sosialnya maka masyarakat harus melakukan perubahan itu. Sebaliknya, teori ketergantungan justru memandang tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan yang paling dalam. Membandingkan kedua teori tersebut, khususnya dalam perkembangan awal teorinya (klasik), teori modernisasi lebih melihat keterbelakangan disebabkan oleh faktor dari dalam suatu masyarakat atau negara sendiri, sementara teori ketergantungan memandang faktor luarlah sebagai penyebabnya, seperti keterlibatan negara maju dalam urusan ekonomi negara berkembang.

C. TEORI PASCA-KETERGANTUNGAN

Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa teori pasca-ketergantungan merupakan reaksi atau teori yang menolak teori ketergantungan. Meskipun beberapa teori mengkritik teori ketergantungan, namun dalam penjelasan berikut ini hanya diuraikan dua teori baru dalam kelompok teori-teori pembangunan, yang mencoba memecahkan masalah-masalah yang terdapat pada teori ketergantungan, seperti yang dijelaskan oleh Budiman (1995), yaitu teori artikulasi dan teori sistem dunia.

1. Teori Artikulasi

Teori artikulasi bertitik tolak dari konsep formasi sosial. Konsep ini dikaitkan dengan konsep cara produksi, seperti cara produksi feodal, cara produksi kapitalis, cara produksi sosialis, dan sebagainya. Masing-masing cara produksi mempunyai ciri yang berlainan dengan cara produksi lainnya. Proses peralihan cara produksi, misalnya dari cara produksi feodal ke cara produksi kapitalis memakan waktu yang lama. Dalam arti peralihan cara produksi tersebut tidak secara tiba-tiba, atau kemarin cara produksi feodal, hari ini tiba-tiba menjadi kapitalis. Akan tetapi, pada setiap formasi sosial ada satu jenis cara produksi yang menguasai cara produksi lainnya, yang hubungannya dengan lainnya menentukan tingkat dan pengaruhnya.

Sebagai contoh, di Amerika Serikat dan Jepang, formasi sosial yang ada adalah formasi sosial kapitalis, karena cara produksi kapitalislah yang paling dominan di kedua negara tersebut. Tetapi, unsur feodal yang merupakan cara produksi yang tidak dominan, jelas lebih kuat di Jepang daripada di Amerika Serikat. Karena itu, penjelmaan kapitalisme di Amerika Serikat lain dengan yang menjelma di Jepang. Di sinilah muncul konsep artikulasi. Dikatakan, artikulasi kapitalisme di Amerika Serikat lain dengan di Jepang, karena porsi campuran unsur-unsurnya yang berlainan.

Pada teori artikulasi, persoalan keterbelakangan dilihat dalam lingkungan produksi. Ini berbeda dengan teori ketergantungan (terutama teori Andre Gunder Frank) yang menganggap masalah keterbelakangan harus dilihat pada lingkungan proses pertukaran, yakni dalam perdagangan internasional, di mana negara-negara pinggir dirugikan. Tetapi teori ketergantungan yang dikembangkan oleh Cardoso, meskipun tidak terlalu nyata, keterbelakangan lebih dilihat sebagai masalah struktur sosial politik dan ekonomi dari negara yang bersangkutan. Dengan demikian pandangan Cardoso lebih dekat dengan teori artikulasi.

Bagi teori artikulasi, keterbelakangan di negara-negara dunia ketiga harus dilihat sebagai kegagalan dari kapitalisme untuk berfungsi secara murni, sebagai akibat dari adanya cara produksi lain di negara-negara tersebut. Tiap-tiap negara tentunya mempunyai kombinasi cara-cara produksi yang unik, yang satu berbeda dari yang lainnya, sebagai akibat dari perbedaan proses perjalanan sejarah masing-masing. Karena itu, keterbelakangan harus dipelajari secara kasus demi kasus. Di sini kita lihat titik persamaan dengan pendapat Cardoso, yang menolak masalah ketergantungan dijadikan teori, karena teori cenderung mengembangkan konsep-konsep yang berlaku umum.

2. Teori Sistem Dunia

Seperti halnya teori artikulasi, teori sistem dunia merupakan reaksi atas teori ketergantungan. Reaksi ini muncul karena teori ketergantungan dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di dunia ketiga. Yang bisa dijelaskan hanyalah gejala terjadinya keterbelakangan.

Teori sistem dunia yang dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein didasarkan pada pemikiran bahwa dunia terdiri dari banyak sistem mini yang saling terpisah, dan tidak ada suatu sistem yang menguasai seluruh dunia. Sistem dunia yang ada sekarang adalah kapitalisme global. Wallerstein

kemudian membagi tiga kelompok negara; pusat, setengah-pinggiran dan pinggiran. Konsep ini diambil dari teori ketergantungan. Wallerstein hanya menambah kelompok setengah-pinggiran.

Perbedaan inti dari ketiga kelompok ini adalah kekuatan ekonomi dan politik dari masing-masing kelompok. Jelas, yang paling kuat adalah negara-negara pusat. Kelompok negara-negara kuat, yakni negara-negara pusat, mengambil keuntungan yang paling banyak, karena kelompok ini bisa memanipulasikan sistem dunia sampai batas-batas tertentu. Selanjutnya, negara setengah-pinggiran mengambil keuntungan dari negara-negara pinggiran yang merupakan pihak yang paling dieksploitasi.

Dinamika dari ketiga kelompok negara ini ditentukan oleh sistem dunia. Bagi Wallerstein, semua sistem sosial harus dilihat sebagai sebuah keseluruhan. Negara kebangsaan, dalam sebuah dunia yang modern, bukan lagi sebuah sistem yang tertutup dan karena itu tidak bisa dianalisis seakan-akan mereka berdiri sendiri.

Selanjutnya, menurut Wallerstein, negara-negara bisa “naik atau turun kelas,” misalnya dari negara pusat menjadi negara setengah-pinggiran dan kemudian menjadi negara pinggiran, dan sebaliknya. Naik dan turun kelasnya negara-negara ini ditentukan oleh dinamika sistem dunia. Pada suatu saat, Inggris, Belanda dan Prancis adalah negara-negara pusat yang berperan dominan dalam sistem dunia. Tetapi kemudian, Amerika Serikat muncul menjadi negara terkuat setelah negara-negara Eropa hancur dalam perang Dunia II. Tetapi, pada saat ini muncul Jepang sebagai negara yang menantang kekuasaan hegemonik Amerika Serikat. Bangun dan jatuhnya kekuatan negara-negara ini oleh Wallerstein dijelaskan melalui sebuah analisis sejarah dari dinamika sistem dunia yang dituangkan dalam bukunya.

Di samping itu, teori Wallerstein dapat dipakai untuk menjelaskan naiknya negara-negara industri baru (Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong dan Singapura) dari posisinya sebagai negara pinggiran menjadi negara-negara setengah pinggiran. Naiknya upah kerja di negara-negara pusat membuat negara-negara ini memberikan kesempatan pada beberapa negara yang sudah siap (dalam arti kesiapan teknologi, kestabilan politik, disiplin kerja, dan sebagainya) untuk mengambil alih produksi barang-barang industri yang lebih sederhana. Industri dengan teknologi canggih yang memberi keuntungan besar seperti komputer, tetap ada di tangan negara-negara pusat.

kesempatan ini kemungkinan negara-negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong dan Singapura ini naik kelas.

Wallerstein kemudian merumuskan tiga strategi bagi terjadinya proses kenaikan kelas ini:

- a. Kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang datang. Karena dinamika yang ada pada sistem perekonomian dunia, pada suatu kali harga komoditi primer menjadi murah sekali, dan barang-barang industri mahal. Akibatnya, negara-negara pinggiran tidak lagi bisa mengimpor barang-barang industri. Dalam keadaan seperti ini, negara yang sudah terdesak mengambil tindakan yang berani untuk mulai melakukan industrialisasi substitusi impor sendiri. Meskipun tindakan ini hanya membuat negara ini beralih dari satu jenis ketergantungan ke jenis ketergantungan yang lain, tetapi dalam kriteria ekonomi, ada kemungkinan negara ini naik kelas dari negara pinggiran menjadi negara setengah-pinggiran.
- b. Kenaikan kelas terjadi juga melalui undangan. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan industri raksasa di negara-negara pusat perlu melakukan ekspansi ke luar. Maka lahirlah perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini membutuhkan mitra usaha di negara-negara berkembang, karena macam-macam alasan. (Lihat analisis Peter Evans tentang lahirnya pembangunan dalam ketergantungan, yang sudah diuraikan sebelumnya.) Akibat dari perkembangan ini, muncullah industri-industri di negara-negara pinggiran, yang diundang oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk bekerja sama. Proses ini jelas dapat meningkatkan posisi negara pinggiran ini menjadi setengah pinggiran.
- c. Kenaikan kelas yang ketiga terjadi karena negara tersebut menjalankan kebijakan untuk memandirikan negaranya. Wallerstein menunjuk Tanzania sebagai contoh. Negara itu melaksanakan konsep ujamaa untuk melepaskan dirinya dari eksploitasi negara-negara yang lebih maju. Kalau berhasil, tindakan melepaskan diri ini bisa membuat negara tersebut naik kelas menjadi negara setengah-pinggiran. Tetapi, semuanya ini tentunya tergantung pada kondisi sistem dunia yang ada, apakah pada saat negara tersebut mencoba memandirikan dirinya, peluang dari sistem dunia memang ada. Kalau tidak, tentu saja usaha ini bisa gagal.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan salah satu ciri dari teori-teori modernisasi dalam pembangunan!
- 2) Bandingkan antara tahap masyarakat tradisional dan tahap konsumsi massal yang tinggi, menurut Teori Rostow!
- 3) Jelaskan perbedaan pandangan antara Andre Gunder Frank dan Dos Santos dalam melihat masalah keterbelakangan di negara-negara pinggiran (satelit)!
- 4) Jelaskan perbedaan pandangan antara teori artikulasi dan teori ketergantungan (terutama teori Andre Gunder Frank) dalam melihat persoalan keterbelakangan!
- 5) Jelaskan strategi terjadinya proses kenaikan kelas dari suatu negara menurut teori sistem dunia!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pelajari kembali uraian bagian teori modernisasi.
- 2) Pelajari kembali teori Rostow (tahap-tahap pembangunan).
- 3) Pelajari kembali teori ketergantungan.
- 4) Pelajari kembali teori artikulasi.
- 5) Pelajari kembali teori sistem dunia.



RANGKUMAN

Sesuai perkembangan pemahaman mengenai pembangunan dan perubahan sosial, teori-teori pembangunan juga mengalami perkembangan. Sejumlah teori ini bisa dikelompokkan atas tiga, yaitu kelompok teori modernisasi, kelompok teori ketergantungan, dan kelompok teori pasca-ketergantungan. Dalam teori modernisasi, teori Harrod-Domar melihat masalah pembangunan pada dasarnya adalah masalah kekurangan modal. Sementara teori Rostow melihat pembangunan sebagai proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat maju. Rostow membagi proses pembangunan menjadi lima tahap, yaitu masyarakat

tradisional, prakondisi untuk lepas landas, lepas landas, menuju kedewasaan, dan zaman konsumsi massal yang tinggi.

Teori modernisasi mendapat kritikan dari teori ketergantungan. Andre Gunder Frank melihat hubungan dengan negara metropolis selalu berakibat negatif bagi negara satelit. Berbeda dengan pandangan Dos Santos, yang melihat ketergantungan negara satelit hanya merupakan bayangan dari negara metropolis. Artinya, perkembangan negara satelit tergantung dari perkembangan negara metropolis yang menjadi induknya. Demikian sebaliknya, bila terjadi krisis pada negara metropolis maka negara satelitnya pun kejangkitan krisis. Dia membagi bentuk ketergantungan terdiri atas tiga, yaitu ketergantungan kolonial, ketergantungan finansial-industrial, dan ketergantungan teknologis-industrial.

Selanjutnya, teori ketergantungan juga menuai kritik, misalnya dari teori artikulasi dan teori sistem dunia. Kedua teori ini merupakan dua teori baru dalam kelompok teori-teori pembangunan, yang bisa dikelompokkan ke dalam teori-teori pasca-ketergantungan. Teori artikulasi menekankan pada konsep formasi sosial yang dikaitkan dengan konsep cara produksi. Adapun teori sistem dunia melihat bahwa dinamika perkembangan dari suatu negara sangat ditentukan oleh sistem dunia.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Untuk memecahkan persoalan keterbelakangan di negara-negara Dunia Ketiga menurut Teori Harrod-Domar maka perlu dilakukan
 - A. penambahan modal
 - B. perubahan secara evolusi
 - C. perubahan secara revolusi
 - D. mengurangi ketergantungan

- 2) Menurut Rostow, negara yang produksinya dipakai untuk konsumsi dan tidak untuk diinvestasikan, termasuk dalam tahap
 - A. tradisional
 - B. prakondisi
 - C. lepas landas
 - D. kedewasaan

- 3) Menurut Rostow negara yang perkembangan industrinya tidak saja teknik-teknik produksi, tapi juga dalam aneka barang yang diproduksi, termasuk dalam perkembangan tahap
 - A. prakondisi
 - B. kedewasaan
 - C. lepas landas
 - D. konsumsi tinggi

- 4) Titik terpenting dalam gerak kemajuan dari suatu masyarakat menurut teori Rostow, terletak pada tahap
 - A. tradisional
 - B. prakondisi
 - C. lepas landas
 - D. kedewasaan

- 5) Dalam teori ketergantungan salah satu cara bagi negara-negara terbelakang untuk bisa maju, adalah
 - A. ikut aktif dalam perekonomian dunia
 - B. menjamin hubungan dengan negara metropolis
 - C. melepaskan hubungan dengan negara metropolis
 - D. melaksanakan formasi sosial

- 6) Dalam suatu negara yang kegiatan ekonomi utamanya adalah perdagangan ekspor dari hasil bumi yang dibutuhkan negara penjajah, merupakan bentuk ketergantungan....
 - A. finansial
 - B. teknologi
 - C. ekonomi
 - D. kolonial

- 7) Teori pembangunan yang melihat masalah keterbelakangan dari lingkungan proses pertukaran, adalah teori
 - A. Modernisasi
 - B. Ketergantungan
 - C. Artikulasi
 - D. Sistem Dunia

- 8) Teori pembangunan yang melihat masalah keterbelakangan dari lingkungan produksi, adalah teori
 - A. Modernisasi
 - B. Ketergantungan

- C. Artikulasi
D. Sistem Dunia
- 9) Teori pembangunan yang menjelaskan suatu negara bisa naik atau turun kelas, misalnya dari negara pusat menjadi negara setengah-pinggiran, dan sebaliknya, adalah teori
- A. Modernisasi
B. Ketergantungan
C. Artikulasi
D. Sistem Dunia
- 10) Proses naiknya kelas suatu negara dapat terjadi melalui tiga strategi, *kecuali*
- A. merebut kesempatan yang datang
B. melakukan ekspansi keluar
C. melepaskan diri dari eksploitasi
D. meningkatkan tabungan dan investasi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3**Pendekatan dan Indikator Pembangunan**

S elama hampir setengah abad, beragam teori pembangunan didiskusikan dan dibicarakan berbagai kalangan. Beragam teori itu dikembangkan terutama untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan, seperti kemiskinan dan keterbelakangan, di banyak negara berkembang. Berikut akan diuraikan beberapa di antara pendekatan utama dalam teori pembangunan, beserta indikator pengukurannya.

A. PENDEKATAN PERTUMBUHAN DAN INDIKATORNYA

Pendekatan ini berorientasi pada pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal sebagai kekuatan pembangunan. Baik Hidayat maupun Esmara dalam Khairuddin (1992), mengemukakan bahwa apa pun alasannya, modal adalah suatu komponen atau variabel yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi semaksimal mungkin sehingga model pembangunan selalu diarahkan kepada *capital intensive* (padat modal), dan melahirkan bentuk model *capital output ratio* (COR) yang sangat populer sebagai model pembangunan bagi negara maju maupun negara berkembang sekitar tahun lima puluhan.

Menurut Budiman (1995), untuk mengukur atau menilai keberhasilan suatu negara melaksanakan pembangunan dari aspek pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat dari produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya, dengan menggunakan ukuran Produk Nasional Bruto (PNB, atau *Gross National Product*, GNP) dan Produk Domestik Bruto (PDB, atau *Gross Domestic Product*, GDP).

Baik PNB maupun PDB adalah mengukur hasil keseluruhan dari suatu negara. Karena antara satu negara dengan negara lainnya berbeda atau berlainan jumlah penduduknya maka dipakai ukuran PNB/kapita atau PDB/kapita. Dengan itu, dapat dilihat berapa produksi rata-rata setiap orang dari negara yang bersangkutan.

Untuk membandingkan negara yang satu terhadap negara yang lainnya dapat dilihat dari, misalnya suatu negara yang mempunyai PNB/kapita/tahun sama dengan US \$750 dianggap lebih berhasil pembangunannya daripada negara lain yang PNB/kapita/tahunnya hanya sebesar US \$500. Dengan

demikian, pembangunan di sini diartikan sebagai jumlah kekayaan keseluruhan suatu bangsa atau negara.

B. PENDEKATAN PEMERATAAN DAN INDIKATORNYA

Pendekatan ini timbul sebagai akibat adanya masalah-masalah yang dijumpai pada pendekatan pembangunan dengan orientasi pada pertumbuhan ekonomi. Misalnya, seiring dengan meningkatnya PNB pada suatu negara, juga muncul pengangguran yang tidak dapat diatasi, serta ketimpangan pendapatan yang memburuk. Dengan demikian, orientasi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi saja tidak secara otomatis terjadi pembangunan yang merata di seluruh lapisan masyarakat atau terjadi perembesan ke bawah (*trickle-down*) sebagaimana yang diharapkan oleh pendekatan pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut juga telah disinyalir oleh Budiman (1995), bahwa kekayaan keseluruhan yang dimiliki atau yang diproduksi oleh suatu negara, belum tentu dapat merata atau dimiliki oleh semua penduduknya. Artinya, mungkin dalam suatu negara dapat kita lihat sebagian kecil orang memiliki kekayaan yang berlimpah, sementara sebagian besar lainnya hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, timbul keinginan untuk memasukkan aspek pemerataan dalam ukuran pembangunan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kalau kekayaan dirata-ratakan dalam PNB/kapita atau PDB/kapita, akan diperoleh nilai yang tinggi. Kemiskinan yang ada tertutup oleh adanya kekayaan tersebut. Dapatkah negara seperti ini dikatakan maju pembangunannya?

Budiman menjelaskan bahwa secara sederhana pemerataan dapat diukur dengan melihat berapa persen dari PNB diraih oleh 40% penduduk termiskin, berapa persen oleh 40% penduduk golongan menengah, dan berapa persen oleh 20% penduduk terkaya. Jika 20% dari penduduk terkaya meraih lebih dari 50% PNB, sedangkan sisanya dibagi di antara 80% penduduknya maka dikatakan terjadi ketimpangan antara orang-orang kaya dan miskin yang sangat besar. Ketimpangan yang dianggap mencolok, jika 40% penduduk termiskin hanya menerima kurang dari 12%. Ketimpangan yang dianggap sedang, jika 40% penduduk termiskin menerima antara 12%-17%. Ketimpangan dianggap lumayan kecil, jika 40% penduduk miskin menerima lebih dari 17%.

Suatu contoh seperti terlihat pada Tabel 1.1 menunjukkan suatu hipotesis dari pemerataan pendapatan bagi suatu negara yang sedang berkembang

(hanya contoh saja). Dalam tabel tersebut ada dua puluh “individual” yang mewakili/menggambarkan seluruh populasi negara itu yang diatur untuk meningkatkan penghasilan pribadi per tahun yang berkisar dari individual yang berpenghasilan paling rendah (0,8 unit) sampai kepada penghasilan yang paling tinggi (15,0 unit). Jumlah atau penghasilan nasional dari semua individual berjumlah 100 unit dan merupakan jumlah dari semua pemasukan dalam kolom 2. Dalam kolom 3, populasi dikelompokkan menjadi *Quintiles* atau lima kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 individual. *Quintile* atau lima kelompok pertama menggambarkan 20 persen dari populasi yang menerima paling rendah dalam skala penghasilan. Kelompok ini hanya menerima 5 persen (yaitu, suatu jumlah dari 5 unit uang) dari jumlah penghasilan nasional. *Quintile* yang kedua (5-8 individual) menerima 9 persen dari jumlah penghasilan. Alternatif lain, 40 persen dari populasi yang paling rendah (*quintile* satu plus dua) hanya menerima 14 persen dari penghasilan, sedangkan 20 persen populasi yang paling tinggi (*quintile* yang kelima) menerima 51 persen dari jumlah penghasilan.

Ukuran yang biasa mengenai ketimpangan penghasilan yang bisa berasal dari kolom tiga adalah rasio dari penghasilan- penghasilan yang diterima oleh 40 persen populasi yang paling rendah, dibandingkan dengan 20 persen populasi yang paling tinggi. Rasio ini sering kali dipergunakan sebagai ukuran tingkat ketimpangan antara dua garis ekstrem, sangat miskin dan sangat kaya dalam suatu negara. Dalam contoh ini, rasio ketimpangan sama dengan 14,0 dibagi dengan 51,0 atau kurang lebih 1 dibanding 3,7 atau 0,28.

Untuk memberikan keterangan yang lebih terperinci mengenai ukuran pemerataan penghasilan, *decile* atau sepuluh persen bagian/andil dimuat dalam kolom 4. Kita melihat umpamanya, bahwa 10 persen yang paling rendah dari populasi (dua individual yang paling miskin) menerima 10 persen yang paling tinggi (dua individual yang paling kaya) menerima 28,5 persen. Akhirnya, jika kita ingin mengetahui berapa yang diterima oleh 5 persen yang paling tinggi, kita bagi jumlah populasi menjadi 20 kelompok individual yang sama, (dalam contoh kita, masing-masing hanya 20 individual) dan hitunglah persentase dari jumlah penghasilan yang diterima oleh kelompok paling tinggi. Dalam Tabel. 1.1 kita melihat bahwa 5 persen yang paling tinggi populasi (individual yang kedua puluh) menerima 15 persen dari penghasilan, bagian/andil yang lebih tinggi daripada bagian/andil gabungan 40 persen populasi yang paling rendah penghasilannya.

Tabel 1.1
 Ukuran Secara Hipotesis Pemerataan Penghasilan Pribadi Atas Dasar
 Bagian/Andil Penghasilan di Negara-negara yang Kurang Maju Quintiles dan
 Deciles
 (sebagai contoh saja)

Individu	Penghasilan Pribadi (Satuan/Unit Uang)	Persentase Bagian/Andil dalam Jumlah Penghasilan	
		Quintiles	Deciles
1	0,8		
2	1,0		1,8%
3	1,4		
4	1,8	5%	3,2%
5	1,9		
6	2,0		3,9%
7	2,4		
8	2,7	9%	5,1%
9	2,8		
10	3,0		5,8%
11	3,4		
12	3,8	13%	7,2%
13	4,2		
14	4,8		9,0%
15	5,9		
16	7,1	22%	13,0%
17	10,5		
18	12,0		22,5%
19	13,5		
20	15,0	51%	28,5%
Jml 20	100,0	100%	100,0%

(Ukuran ketimpangan Rasio terendah 40% sampai tertinggi 20% = $14/51 = 0,28$).

Sumber: Todaro, 1986.

Dari uraian tersebut, kita dapat mengemukakan bahwa untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya kekayaan atau produktivitas bangsa tersebut yang dilihat, tetapi juga pemerataan kekayaannya. Tidak semua negara yang berhasil meningkatkan PNB/kapitanya, berhasil juga dalam pemerataan hasil-hasil pembangunannya. Demikian juga tidak semua negara yang masih rendah

PNB/kapitanya menunjukkan ketimpangan yang tinggi dalam hal pemerataan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa bangsa atau negara yang berhasil melakukan pembangunan adalah mereka yang di samping produktivitasnya tinggi, juga kemakmuran dan kesejahteraan penduduknya secara relatif merata.

C. PENDEKATAN KEBUTUHAN DASAR DAN INDIKATORNYA

Pendekatan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok merupakan salah satu cara untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan. Konsep kebutuhan dasar selalu terkait dengan masalah kemiskinan sehingga dalam konsep kebutuhan dasar seperti yang dikemukakan oleh Esmara dan Tjokroamidjojo dalam Khairuddin (1992) dapat dibagi dalam dua kategori sebagai berikut.

1. Kebutuhan dasar individu, seperti; pangan, perumahan, sandang, dan beberapa peralatan rumah tangga.
2. Kebutuhan dasar masyarakat secara keseluruhan, seperti; air minum, sanitasi, pengangkutan umum dan kesehatan, fasilitas-fasilitas pendidikan dan kebudayaan.

Selanjutnya, Khairuddin mengemukakan bahwa dua kategori kebutuhan dasar tersebut, yang paling utama dan sering didahulukan adalah kategori yang pertama, yakni pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan perumahan. Hal ini sangat menyangkut kelayakan hidup seorang manusia. Sedangkan kategori yang kedua biasanya baru terpikirkan sebagai kebutuhan apabila kategori pertama sudah berada dalam keadaan yang cukup mantap. Kasarnya, bagaimana mungkin seseorang dapat memikirkan pendidikan, sedangkan perutnya dalam keadaan tidak terisi. Pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar ini kelihatannya lebih ditekankan pada pembangunan negara-negara sedang berkembang, yang masalah kebutuhan pokoknya masih merupakan masalah yang cukup pelik, terutama kebutuhan pangan, sandang dan perumahan serta pendidikan.

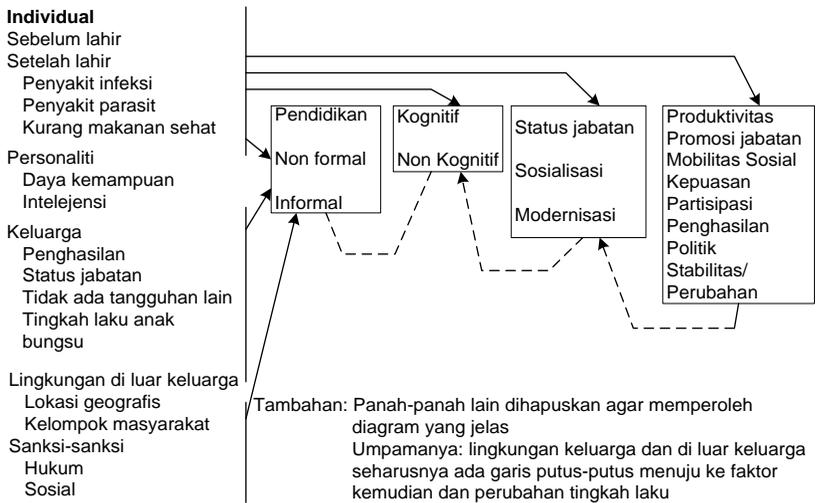
Salah satu cara untuk mengukur masalah kebutuhan dasar ini adalah dengan menggunakan Indeks Mutu Kehidupan Fisik atau *Physical Quality of Life Index* (PQLI). Tolok ukur PQLI seperti dikemukakan oleh Budiman (1995) diperkenalkan oleh Moris yang mengukur tiga komponen, yakni: (1) rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun (2) rata-rata jumlah kematian bayi, dan (3) rata-rata persentase buta dan melek huruf. Ketiga

komponen ini diukur melalui skala 0 sampai dengan 100 dan dijumlahkan ke dalam suatu indeks tunggal, seluruhnya diberi bobot yang sama.

Suatu contoh dapat dikemukakan bahwa kekurangan makanan sehat/bergizi dan penyakit, bukan hanya bisa memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap kemampuan anak seperti membaca, menulis, menyelesaikan hitungan dan berfikir cerdas dan logis di sekolah (kemampuan kognitif). Akan tetapi juga dapat memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap kesempatan-kesempatannya memperoleh dan/atau melaksanakan pekerjaan (status jabatan) dan merendahkan produktivitasnya dan prestasi umum dalam pekerjaan tersebut. Jadi, kesehatan keluarga dan anak adalah determinan yang penting sekali, baik bagi prestasi selama dalam pendidikan maupun kemampuan fisik mental seseorang untuk bisa bekerja secara efektif dalam kehidupan kelak.

Sehubungan dengan hal itu maka anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dengan taraf hidup yang rendah, seringkali berada di tempat yang tidak menguntungkan dalam persaingan, bila berhadapan dengan anak-anak yang ekonominya lebih maju, dalam kegiatan-kegiatan di sekolah misalnya, dan sebagainya. Menurut Todaro (1986), hampir semua studi terhadap prestasi sekolah menunjukkan adanya empat faktor yang paling penting dalam menentukan kemampuan anak untuk belajar, yaitu:

1. lingkungan keluarga, termasuk tingkat penghasilan, pendidikan orang tua, kondisi rumah/tempat tinggal, jumlah anak dalam keluarga itu, dan lain-lain;
2. interaksi kelompok, yaitu jenis anak-anak yang bergaul/berhubungan dengan individu anak itu;
3. personaliti/kepribadian, yaitu kemampuan/kecakapan dan kepandaian yang memang diwarisi anak itu; dan
4. makanan yang bergizi dan kesehatan pada waktu awal (masih bayi).



Sumber: John Simon dalam Todaro, 1986

Gambar 1.1.

Sistem belajar: Sebab-sebab, Konsekuensi-konsekuensi, dan Interaksi

Jika anak pada waktu mulai masuk sekolah kekurangan empat faktor tersebut, sebagaimana yang banyak dialami oleh anak-anak keluarga miskin maka proses pendidikan anak sedikit sekali memberikan efek terhadap kemampuannya untuk meningkatkan dirinya dan memperbaiki ekonominya. Bahkan sebenarnya, si anak ini bisa termasuk di antara 50 persen dari anak-anak sekolah dasar yang putus sekolah sebelum menyelesaikan masa pendidikannya empat tahun. Persamaan kesempatan pendidikan tujuan sosial yang dinyatakan oleh semua bangsa bisa kurang berarti bagi masyarakat, apabila anak-anak itu berasal dari latar belakang yang sangat tidak berimbang.

D. PENDEKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INDIKATORNYA

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pembangunan pada dasarnya adalah peningkatan kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya. Pengertian pembangunan ini pada dasarnya merupakan pengertian pembangunan yang berorientasi pada manusia. Khiruddin (1995)

menjelaskan bahwa pendekatan sumber daya manusia adalah model pembangunan yang mencoba meletakkan diri manusia sebagai unsur mutlak dalam proses pembangunan. Meskipun semua pembangunan, baik di negara maju maupun di negara sedang berkembang, manusia adalah faktor penting dalam pembangunan, dan pembangunan hakikatnya adalah untuk manusia, tetapi dapat dilihat bahwa ada perbedaan kadar dan kualitas manusia dalam pembangunannya itu sendiri.

Singarimbun (1992), mengemukakan bahwa dalam *Human Development Report* yang dikeluarkan oleh UNDP pada tahun 1990 edisi 1991, dikatakan bahwa kurangnya komitmen politik, dan bukan kekurangan sumber dana, merupakan penyebab keterlantaran manusia. Laporan tersebut, menekankan analisisnya pada pembiayaan pembangunan manusia. Kesimpulannya adalah bahwa pembiayaan berbagai negara dewasa ini adalah salah arah dan digunakan secara tidak efisien. Sekiranya hal tersebut dapat diluruskan maka lebih banyak dana akan tersedia untuk mempercepat kemajuan manusia.

Tujuan utama dari pembangunan manusia memperluas pilihan-pilihan dan membuat pembangunan lebih demokratis dan partisipatoris. Ke dalam pilihan-pilihan tersebut tercakup pendapatan dan kesempatan kerja, pendidikan dan kesehatan, dan lingkungan fisik yang bersih dan aman. Pembangunan manusia memerlukan pertumbuhan ekonomi karena tanpa itu tidak mungkin tercipta kesejahteraan secara berkelanjutan. Namun, kebijaksanaan yang ketat diperlukan untuk memadukan pertumbuhan ekonomi tersebut dengan pembangunan manusia.

Salah satu indikator untuk melihat pembangunan yang berorientasi pada manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Indeks ini menurut Singarimbun, menggabungkan pendapatan nasional dengan dua indikator sosial, yakni melek huruf orang dewasa dan harapan hidup. Jadi bedanya dengan Indeks Mutu Manusia adalah dimasukkannya pendapatan nasional.

Melalui penggunaan IPM berbagai contoh dikemukakan Singarimbun, dalam memberikan gambaran tentang peringkat berbagai negara di dunia, baik negara industri maupun negara berkembang. Jepang, Canada, dan Inggris, termasuk dalam kelompok negara-negara industri, secara berturut-turut termasuk dalam peringkat 1, 2, dan 10. Sedangkan Barbados, Korea Selatan, termasuk dalam kelompok negara-negara berkembang, secara berturut-turut termasuk dalam peringkat 20, dan 34. Contoh lain, Indonesia dengan nilai IPM sebesar 0,491 termasuk ke dalam peringkat 98 dari 160

negara di dunia. Negara-negara tetangga di lingkungan Asean, seperti; Malaysia peringkat 51, Thailand peringkat 69, dan Filipina peringkat 80, mempunyai peringkat yang jauh lebih tinggi daripada Indonesia.

Tabel 1.2.
Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Beberapa Negara Industri dan Negara Berkembang Tahun 1990

Negara	Peringkat IPM	Nilai IPM
Negara-negara industri		
1. Jepang	1	0,982
2. Canada	2	0,981
3. Sweden	5	0,976
4. Inggris	10	0,962
5. Denmark	13	0,953
6. Selandia Baru	17	0,947
Negara-negara berkembang		
1. Barbados	20	0,927
2. Korea Selatan	34	0,871
3. Malaysia	51	0,789
4. Thailand	69	0,685
5. Filipina	80	0,600
6. Indonesia	98	0,491

Sumber: UNDP, 1992 dalam Masri Singarimbun, 1992.

Keterangan: Tabel disederhanakan.

Selain berbagai indikator pembangunan tersebut, Budiman (1995) mengusulkan agar faktor lingkungan dan keadilan sosial sebagai kriteria dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan. Kriteria lingkungan menurut Budiman, mungkin suatu negara produktivitasnya tinggi, dan pendapatan penduduknya merata, tetapi bisa saja berada dalam proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini, disebabkan oleh pembangunan yang dilaksanakan tidak mempedulikan aspek lingkungan. Sumber-sumber alamnya semakin terkuras, sementara kecepatan bagi alam untuk rehabilitasi lebih lambat daripada kecepatan perusakan sumber alam. Mungkin juga

pabrik-pabrik yang didirikan menghasilkan limbah kimia yang merusak alam sekitarnya sehingga mengganggu kesehatan penduduk maupun segala makhluk hidup sekitarnya. Padahal sumber-sumber alam dan manusia itu adalah faktor utama yang menghasilkan pertumbuhan yang tinggi. Konsekuensi dari adanya kondisi seperti itu, sering kali pembangunan dianggap berhasil, namun tidak memiliki daya kelestarian yang memadai. Akibatnya, pembangunan tidak bisa berkelanjutan (*sustainable*). Karena itu, kriteria lingkungan perlu dipertimbangkan sebagai tolok ukur pembangunan atau faktor yang menentukan, seperti misalnya; kerusakan sumber daya alam, polusi yang terjadi akibat limbah industri, dan sebagainya.

Selanjutnya, kriteria keadilan sosial (pemerataan pendapatan), juga perlu mendapat perhatian karena dapat membawa dampak terhadap kerusakan sosial. Misalnya, jika terjadi kesenjangan yang mencolok antara orang-orang kaya dan miskin, masyarakat yang bersangkutan dapat menjadi rawan secara politis. Dengan demikian, seperti juga masalah kerusakan alam yang dapat mengganggu kesinambungan pembangunan, faktor keadilan sosial juga merupakan semacam kerusakan sosial yang bisa mengakibatkan dampak yang sama. Kerusakan sosial ini antara lain dapat diukur oleh indeks Gini dan tolok ukur PQLI. Jadi pembangunan yang berhasil menurut Budiman adalah pembangunan yang mempunyai unsur pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan berkesinambungan (tidak terjadi kerusakan sosial, dan tidak terjadi kerusakan alam).

E. PENDEKATAN LAINNYA

Selain keempat pendekatan yang sudah disebutkan sebelumnya, masih terdapat beberapa pendekatan lain di antaranya, di antaranya sistem *employment generation* dan pendekatan kemandirian.

Sistem *employment generation* mengutamakan pencetakan kesempatan kerja baru dalam rangka kerja sama dengan pihak swasta. Hanya saja, akibat kemampuan ekonomi yang terbatas mereka sulit bersaing dengan sektor formal. Maka berdasarkan saran ILO dipusatkan perhatian pada bantuan modal untuk golongan ekonomi lemah tetapi mempunyai kemampuan sehingga akan tercetak lebih banyak lagi tenaga kerja (Susanto, 1984).

Sementara pendekatan kemandirian (*the self-reliance approach*) muncul sebagai konsekuensi logis dari berbagai upaya negara dunia ketiga untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap negara-negara industri maju.

Soedjatmoko melihat bahwa konsep kemandirian menyajikan dua perspektif, yaitu pertama adanya penekanan yang lebih diutamakan pada hubungan timbal balik dan saling menguntungkan dalam perdagangan dan kerja sama pembangunan. Kedua, adalah lebih mengandalkan pada kemampuan dan sumber daya sendiri untuk kemudian dipertemukan dengan perdebatan internasional tentang pembangunan (Adi, 2001).

Tentu saja berbagai pendekatan pembangunan ini terus berkembang dan mengalami penyempurnaan, sebagaimana teori-teori pembangunan sendiri. Bisakah Anda menyebutkan beberapa pendekatan lainnya?



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan perbedaan orientasi dan cara mengukur pembangunan antara pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan!
- 2) Jelaskan kategori kebutuhan dasar sesuai konsep pendekatan kebutuhan dasar, dan kategori kebutuhan dasar mana yang sering didahulukan!
- 3) Jelaskan indikator yang biasa digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan, pada pendekatan kebutuhan dasar!
- 4) Jelaskan tujuan utama pembangunan yang berorientasi pada manusia, dan indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan!
- 5) Jelaskan faktor lingkungan dan keadilan sosial sebagai kriteria yang dapat dijadikan indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pelajari kembali uraian pendekatan pertumbuhan dan pemerataan.
- 2) Pelajari kembali uraian pendekatan kebutuhan dasar.
- 3) Pelajari kembali uraian pendekatan kebutuhan dasar dan indikatornya.
- 4) Pelajari kembali uraian pendekatan SDM dan indikatornya.
- 5) Pelajari kembali uraian pada bagian akhir kegiatan belajar ini.



Terdapat berbagai pendekatan dan upaya untuk mengukur hasil pembangunan. Salah satu yang paling luas digunakan adalah pendekatan pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan PNB atau PDB sebagai kriteria ukuran keberhasilan pembangunan. Namun, muncul pendekatan pemerataan sebagai reaksi terhadap pendekatan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi saja tidak menjamin kesejahteraan yang merata pada seluruh penduduk. Secara sederhana pemerataan diukur dengan berapa besarnya pendapatan yang diterima oleh 40% kelompok bawah, berapa besarnya pendapatan yang diterima oleh 40% kelompok menengah, dan berapa besarnya pendapatan yang diterima oleh 20% kelompok atas. Indeks Gini merupakan salah satu cara yang biasa digunakan untuk mengukur ketimpangan pembagian pendapatan masyarakat.

Pendekatan kebutuhan dasar adalah salah satu cara lain untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan. Indikator yang biasa digunakan adalah Indeks Mutu Kehidupan Fisik atau *Physical Quality of Life Index* (PQLI). PQLI mengukur tiga komponen, yaitu; harapan hidup, kematian bayi, dan melek huruf. Kemudian Sajogyo dan Abustam mencoba menambahkan satu komponen dari IMH tersebut, yaitu *Total Fertility Rate* (TFR), yang dinamakan IMH-plus atau IMH berkomponen empat.

Terakhir, pendekatan pembangunan sumber daya manusia adalah suatu model pembangunan yang mencoba meletakkan manusia sebagai unsur mutlak dalam proses pembangunan. Tujuan utama pembangunan manusia adalah memperluas pilihan-pilihan dan membuat pembangunan lebih demokratis dan partisipatoris. Salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks ini menggabungkan pendapatan nasional dan dua indikator sosial, yakni melek huruf dan harapan hidup. Jadi, bedanya dengan indeks mutu manusia adalah dimasukkannya pendapatan nasional.

**TES FORMATIF 3**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pendekatan pertumbuhan ekonomi adalah suatu model pembangunan yang berorientasi pada
 - A. peningkatan produktivitas
 - B. peningkatan efektivitas
 - C. pemerataan pendapatan
 - D. pemenuhan kebutuhan dasar

- 2) Asumsi dari pendekatan pertumbuhan ekonomi, antara lain adalah pembangunan dapat menyebabkan terjadinya
 - A. pemerataan pembangunan
 - B. pemenuhan kebutuhan dasar
 - C. peningkatan kualitas SDM
 - D. perembesan ke bawah

- 3) Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dilihat dari pendekatan pertumbuhan, adalah
 - A. Produk Nasional Bruto (PNB)
 - B. Produk Regional Bruto (PRB)
 - C. Produk Nasional Bruto/kapita
 - D. Produk Regional Bruto/kapita

- 4) Pendekatan pemerataan, merupakan reaksi terhadap pendekatan pertumbuhan, karena terjadi
 - A. perembesan ke bawah
 - B. ketimpangan pendapatan
 - C. pemerataan pendapatan
 - D. pemerataan kekayaan

- 5) Secara sederhana ukuran pemerataan dapat dilihat dari besarnya pendapatan yang diterima oleh golongan penduduk berikut, *kecuali*
 - A. 40% penduduk golongan bawah
 - B. 40% penduduk golongan menengah
 - C. 40% penduduk golongan atas
 - D. 20% penduduk golongan atas

- 6) Untuk mengukur ketimpangan pembagian pendapatan, indeks yang biasa digunakan adalah
- Indeks Gini
 - Indeks Mutu Hidup
 - IMH-plus
 - Indeks Pembangunan Manusia
- 7) Tolak ukur *Physical Quality of Life Index* (PQLI) yang diperkenalkan oleh Moris terdiri dari komponen berikut, *kecuali*
- harapan hidup
 - kematian bayi
 - kelahiran anak
 - melek huruf
- 8) Pembangunan yang berorientasi pada manusia, memerlukan
- pertumbuhan ekonomi
 - pemerataan pendapatan
 - pemenuhan kebutuhan dasar
 - pembiayaan pembangunan
- 9) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator yang menggabungkan antara pendapatan
- harapan hidup dan kematian bayi
 - harapan hidup dan melek huruf
 - kematian bayi dan melek huruf
 - kelahiran anak dan kematian bayi
- 10) Faktor lain yang perlu mendapat pertimbangan dalam mengukur keberhasilan pembangunan, antara lain adalah faktor
- keuangan
 - manusia
 - budaya
 - lingkungan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B. Awal dari konsep pembangunan hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi.
- 2) C. Ide pokok yang terkandung dalam pengertian pembangunan tidak termasuk sebagai suatu sistem.
- 3) A. Kegiatan yang timbul hanya secara insidental, tidak dapat digolongkan sebagai kategori pembangunan.
- 4) B. Proses pembangunan pada dasarnya menekankan akan pentingnya adanya perubahan-perubahan dalam masyarakat.
- 5) A. Dalam arti hakiki pembangunan, pemenuhan kebutuhan dasar adalah menunjang kelangsungan hidup.
- 6) B. Komponen universal kedua dari suatu kehidupan yang baik adalah harga diri.
- 7) C. Makna arti hakiki pembangunan yang ketiga adalah konsep kebebasan, atau kemerdekaan dari penjajahan dan perbudakan.
- 8) D. Selain jawaban A,B, dan C, aspek lain pembangunan untuk mempengaruhi masa depan adalah kelangsungan perkembangan (sustainable) dan interdependensi di antara negara-negara di dunia.
- 9) B. Pembangunan menyangkut masalah-masalah distribusi. Artinya, manfaat hasil pembangunan harus dinikmati oleh seluruh penduduk.
- 10) D. Saling ketergantungan atau ketergantungan timbal balik, tercakup dalam kelangsungan yang tertunjang.

Tes Formatif 2

- 1) A. Teori Harrod-Domar, memandang masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal.
- 2) A. Pada masyarakat tradisional, antara lain ditandai oleh produksi yang masih sangat terbatas.
- 3) B. Pada tahap bergerak kedewasaan, suatu negara industri sudah berkembang dengan pesat dan memantapkan posisinya dalam perekonomian global.
- 4) C. Pada tahap lepas landas, hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi sudah tidak ada.

- 5) C. Teori ketergantungan memandang hubungan dengan negara metropolis selalu berakibat negatif bagi negara terbelakang.
- 6) D. Dalam bentuk ketergantungan kolonial, terjadi dominasi politik dari negara pusat terhadap negara pinggiran.
- 7) B. Teori ketergantungan memandang perdagangan internasional yang ditandai oleh proses pertukaran, negara-negara pinggiran selalu dirugikan.
- 8) C. Teori Artikulasi memandang keterbelakangan terjadi sebagai akibat kegagalan kapitalisme dan adanya cara produksi lain yang diterapkan di negara-negara tersebut.
- 9) D. Teori Sistem Dunia memandang naik turunnya suatu negara, sangat ditentukan oleh dinamika sistem dunia.
- 10) D. Peningkatan tabungan dan investasi merupakan konsep yang ditekankan oleh Teori Modernisasi.

Tes Formatif 3

- 1) A. Keberhasilan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan, dapat dilihat dari produktivitas negara atau produktivitas masyarakat.
- 2) D. Pendekatan pertumbuhan memandang bahwa hasil pembangunan yang meningkat secara otomatis terjadi perembesan (trickle-down).
- 3) C. Antara satu negara dengan negara lainnya berbeda jumlah penduduknya, maka yang dipakai ukuran adalah PNB/kapita.
- 4) B. Seiring dengan meningkatnya PNB suatu negara, juga muncul antara lain ketimpangan pendapatan yang memburuk.
- 5) C. Kriteria ukuran pemerataan pendapatan, dilihat dari besarnya pendapatan yang diterima oleh hanya 20% dari golongan atas, bukan 40%.
- 6) A. Indeks Gini merupakan cara lain yang biasa digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan dalam masyarakat.
- 7) C. Teori ukur POLI yang diperkenalkan oleh Moris, hanya mengukur tiga komponen, yaitu: harapan hidup, kematian bayi, dan melek huruf.
- 8) A. Tanpa pertumbuhan ekonomi, tidak mungkin tercipta kesejahteraan secara berkelanjutan.

- 9) B. Perbedaan antara IPM dengan IHM, terletak pada dimasukkannya pendapatan nasional sebagai salah satu kriteria dalam mengukur pembangunan manusia.
- 10) D. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mempunyai unsur pertumbuhan ekonomi dan berkesinambungan, alam arti tidak terjadi kerusakan sosial dan kerusakan lingkungan (alam).

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Arief, Sritua dan Adi Sasono. (1984). *Ketergantungan dan Keterbelakangan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Bintoro, Mustopadijaya. (1983). *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Bryant dan White. (1987). *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Budiman, Arief. (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Effendi, dkk. (1989). *Alternatif Kebijakan Perencanaan Administrasi*. Seri Monograf. Yogyakarta: FISIP-UGM.
- Long, Norman. (1987). *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Riyadi, Slamet. (1987). *Pembangunan Dasar-dasar dan Pengertiannya*. Surabaya: UNSI.
- Siagian, S.P. (1985). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Singarimbun, Masri. (1992). *Tinjauan Berbagai Indikator Sosial*, dalam Populasi Nomor 1 volume 3 Tahun 1992. Yogyakarta: FPK UGM.
- Suwarsono dan Alvin Y.So. (1991). *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Todaro, Michael, P. (1983). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid I. Jakarta: Ghalia Indonesia.